

Paradigma Desentralisasi Berwujud Pengakuan Otonomi Daerah

PEKANBARU, RAKYAT RIAU – Dalam melakukan pembangunan, pemerintah dihadapkan pada bergapai alternatif paradigma, pendekatan dan metodologi. Dalam era otonomi daerah ini, paradigma pembangunan lebih mengedepankan desentralisasi.

"Implementasi dari paradigma pembangunan desentralisasi itu berwujud pada pengakuan otonomi daerah. Berbeda dengan paradigma pembangunan pada masa orde baru yang berdasarkan sentralistik," kata Asmawi Rewansyah, Deputi Bidang Tatalaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam seminar yang diselenggarakan Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) kemarin (21/3) di Hotel Sahid Pekanbaru.

Menurut Asmawi, paradigma pembangunan sentralisasi disamping memiliki keunggulan, juga terdapat banyak kelemahannya. Oleh karena itu, konsep pembangunan sentralistik sering kali mendapat kecaman dan kritikan dari berbagai pihak.

Akan tetapi kata dia, paradigma yang kini ditonjolkan adalah berda-

sarkan desentralisasi yang merupakan implementasi pengakuan otonomi daerah.

Asmawi menjabarkan perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi yang meliputi semua bidang secara terpadu. Perencanaan pembangunan itu, terdiri atas perencanaan yang disusun oleh Kementerian atau lembaga perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu, pengamat politik UNRI Alimin Siregar dalam makalahnya menjelaskan otonomi daerah lebih bisa mengurangi beban pemerintah pusat. Beban ini, mencakup aspek jangkauan pelayanan umum, distribusi sosial yang lebih merata dan pekerjaan birokrasi yang terlalu menumpuk pada suatu lembaga.

"Otonomi dapat menjadi sarana untuk memperpendek jarak dalam pengambilan keputusan dan sekaligus efisiensi birokrasi," kata dia. (mas) . 22/3/2005

RAKYAT RIAU

Tanggal 22 maret 2005